Katalog BPS : 6205003.34

STATISTIK POLITIK dan KEAMANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2014

http://yogyakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATISTIK
POLITIK dan KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2014

http://yogyakarta.bps.go.id

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2014

Nomor Katalog : 46 030 001.34
Nomor ISSN : 2460-3139
Nomor Publikasi : 34523.15.22

Ukuran Buku : 21,5 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 54

Naskah
Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit/Sampul
Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

http://yogyakarta.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 merupakan publikasi ke tujuh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyajikan data tentang keamanan, hasil pemilu legislatif dan presiden, serta data lainnya yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Data yang disajikan berupa data sekunder bersumber dari Polres/Polresta/Polda, KPU, DPRD, Bappeda, Humas dan data primer hasil survei BPS yaitu Podes 2014 dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2014.

Publikasi ini menyajikan gambaran tingkat keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui jumlah dan jenis tindak kriminalitas, pelaku, korban, serta upaya penanggulangannya, juga situasi politik Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data hasil pemilu dan pemilukada serta produk hukum yang dihasilkan DPRD.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan kritik untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan.

http://yogyakarta.bps.go.id

Yogyakarta, Desember 2015
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

Y. Bambang Kristianto, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel Lampiran	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II Metodologi	
2.1 Jenis dan Sumber Data	4
2.2 Konsep dan Definisi	4
2.3 Penjelasan Teknis	7
Bab III Gambaran Umum Kriminalitas di D.I. Yogyakarta	
3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah	9
3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta	10
3.3 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan	11
3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan	13
Bab IV Gambaran Umum Politik D.I. Yogyakarta	
4.1 Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014	15
4.2. Peran DPRD	16
4.3. Pemilihan Kepala Daerah	17
4.4. Perkembangan Demokrasi di D.I.Yogyakarta	18
Tabel-tabel	22

http://yogyakarta.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Rasio Penduduk per Polisi di D.I.Yogyakarta Tahun 2014……...	9
Gambar 3.2	Persentase Tindak Kejahatan yang Dapat diselesaikan di D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2014.....…….	10
Gambar 3.3	Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014…….	11
Gambar 3.4	Persentase Pelaku Tindak Kejahatan oleh Anak-Anak dari Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014……	13
Gambar 4.1	Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.....…….	15
Gambar 4.2	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Kabupaten/kota dan D.I. Yogyakarta Tahun 2014……...…….....	17
Gambar 4.3	Perkembangan Indeks Demokrasi D.I. Yogyakarta 2010-2014.....	20
Gambar 4.4	Perkembangan Indeks Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2010-2014.....	21

http://yogyakarta.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Halaman

Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	22
Tabel 2	Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/kota dan Wilayah Kerja di D.I. Yogyakarta Tahun 2014	22
Tabel 3	Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di D.I.Yogyakarta Tahun 2014.....	23
Tabel 4	Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	23
Tabel 5	Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014	24
Tabel 6	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan *(Crime Total)* di D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2014.....	24
Tabel 7	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan *(Crime Cleared)* di D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2014	25
Tabel 8	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan *(Clearance Rate)* di D.I. Yogyakarta Tahun 2012– 2014.....	25
Tabel 9	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan *(Crime Rate)* per100.000 Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2014.....	26
Tabel 10	Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	26
Tabel 11	Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal menurut Jenisnya per Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	27
Tabel 12	Jumlah Laporan Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	28
Tabel 13	Jumlah Penyelesaian Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	29
Tabel 14	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014.....	30
Tabel 15	Selang Waktu (*Crime Clock*) Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014	31

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 16 Jenis Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Keras di D.I. Yogyakarta Tahun 2013 – 2014……..... 31

Tabel 17 Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 .....……... 32

Tabel 18 Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta Tahun 2014…....……..…..... 33

Tabel 19 Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan menurut Jenisnya di D.I Yogyakarta Tahun 2014……..... 34

Tabel 20 Jumlah Jaksa dan Non Jaksa menurut Jenis Kelamin di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri D.I.Yogyakarta, Tahun 2014…….. 35

Tabel 21 Jumlah Hakim dan Non Hakim menurut Jenis Kelamin di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri D.I.Yogyakarta, Tahun 2014……..... 36

Tabel 22 Jumlah Perkara Penting Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2014……..... 37

Tabel 23 Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta, Tahun 2014…….....…..... 38

Tabel 24 Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di D.I. Yogyakarta Tahun 2014……..... 39

Tabel 25 Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 .....…… 40

Tabel 26 Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 .....……....……. 41

Tabel 27 Jumlah Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 .....…….. 41

Tabel 28 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di D.I Yogyakarta (DPRD Prov.)……...…….…. 42

Tabel 29 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di D.I Yogyakarta (DPRD Kab./Kota)…….....…….…. 42

Tabel 30 Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 di D.I. Yogyakarta 43

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 31 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di D.I Yogyakarta 43

Tabel 32 Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten/kota dan D.I. Yogyakarta Tahun 2013 dan 2014……...…… 44

Tabel 33 Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di D.I.Yogyakarta 44

Tabel 34 Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta……..... 45

Tabel 35 Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta……... 45

Tabel 36 Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Jabatan Sebelumnya di D.I. Yogyakarta …….....…...……... 46

Tabel 37 Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di D.I. Yogyakarta, Tahun 2012 – 2014 (dalam rupiah).....…. 46

Tabel 38 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta, 2010-2014……..….....….... 47

Tabel 39 Perkembangan Skor Indikator IDI Tahun 2013 dan 2014……...……... 48

http://yogyakarta.bps.go.id

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2014, beberapa tragedi tindak kekerasan telah terjadi di D.I. Yogyakarta. Namun demikian, hingga saat ini situasi keamanan di Yogyakarta masih cukup kondusif. Ini ditandai dengan tidak adanya gejolak dalam sejumlah momen penting yang berdekatan dengan hari-hari penting seperti perayaan hari besar agama dan peringatan hari besar nasional. Selain itu, tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan mereka menjadi hal yang paling mendukung kondisi keamanan di wilayah D.I. Yogyakarta.

Selain kondisi keamanan yang sempat terganggu, situasi politik di wilayah ini juga sempat mulai memanas dengan terjadinya beberapa peristiwa perselisihan yang telah melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari kalangan masyarakat terpelajar sampai elit kultural. Namun hal ini masih dalam batas kewajaran karena mereka masih mengedepankan kedamaian, toleransi, dan kekompakan serta masih mempertahankan sinergi antar dimensi sosial dan politik. Pemerintahan dijalankan dengan tetap selalu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara, pemberian kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintahan.

Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Perubahan politik juga terjadi di D.I. Yogyakarta ditandai dengan disahkannya **Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta** (UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta) pada tanggal 30 Agustus 2012 oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR RI. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat luas bisa mencermati kinerja pemerintahan. Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan keterbukaan tersebut, secara tidak langsung akan memicu para pejabat daerah untuk lebih bekerja keras dan terbuka dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Beragam kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga, bertambah hingga 48 partai pada pemilu tahun 1999, dan terus berubah hingga pada pemilu 2014 tinggal 10 partai politik .

Di sisi lain, setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan sosial yaitu status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri,

http://yogyakarta.bps.go.id

dan terutama rasa aman. Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "..Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk aspek dan dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 ini, berbagai informasi tentang fenomena politik dan keamanan tahun 2014 di D.I. Yogyakarta dicatat, didokumentasikan dan ditampilkan secara berkala sebagai lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi keamanan dan politik masyarakat. Tujuan khususnya, adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas,

http://yogyakarta.bps.go.id

konflik massal, dan peran serta masyarakat beserta DPRD Kabupaten/kota dan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam terwujudnya keamanan dan pembangunan politik.

Ketersediaan data politik dan keamanan sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Ini mengingat dinamika politik seringkali berimbas pada bidang keamanan yang akan merambah ke bidang ekonomi, artinya perkembangan bidang politik dan keamanan, cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu diperlukan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 menyajikan gambaran politik, kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan kejadian konflik massal, serta upaya mewujudkan keamanan di wilayah D.I. Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangakn Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Dua bab berikutnya adalah menyajikan gambaran umum kriminalitas (Bab III) dan gambaran umum politik (Bab IV).

http://yogyakarta.bps.go.id

BAB II. METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari Podes 2014, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan sumber data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, Kejaksaan, Pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, KPU, Kesbanglinmas, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah dan Bappeda Kabupaten/ kota/D.I.Yogyakarta.

2.2 Konsep dan Definisi

A. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

1. *Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian* adalah
   - ✓ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
   - ✓ Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
   - ✓ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid.*
   - ✓ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
   - ✓ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
   - ✓ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- ✓ Orang yang melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang turut melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

http://yogyakarta.bps.go.id

C. Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional (Common Law Crime) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time- Carreer* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

D. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

E. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat "*dark number*".

F. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

G. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (Crime Rate) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

http://yogyakarta.bps.go.id

H. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan; membujuk orang lain dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

I. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

J. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

K. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

L. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

http://yogyakarta.bps.go.id

- Lainnya: Perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

N. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

O. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

P. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Q. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

http://yogyakarta.bps.go.id

2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah;

a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_o} \times 100$$

di mana : t_o = tahun dasar
t = tahun t

b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\textit{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \text{ x } 24 \text{ x } 60 \text{ x } 60}{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \text{ x (detik)}$$

d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearence*)

$$= \frac{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \text{x } 100 \text{ (\%)}$$

e. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol (*crime index)*

$$\textit{Indeks Kriminal} = \frac{\textit{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t}{\textit{Jumlah TindakPidana pada tahun } t_0} \text{ x } 100\%$$

http://yogyakarta.bps.go.id

BAB III. GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI D.I. YOGYAKARTA

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Keamanan suatu wilayah tak lepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam upaya penanggulangan masalah keamanan di D.I. Yogyakarta didukung oleh berbagai prasarana keamanan antara lain 80 polsek/polsekta, 5 polres/polresta, serta 1 polda.

Polisi merupakan satuan organisasi keamanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2014 di D.I. Yogyakarta rasio penduduk per polisi 359, artinya setiap 1 polisi melayani 359 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota rasio penduduk per polisi terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul dengan angka 671, sedangkan angka terkecil berada di Kota Yogyakarta yaitu 218. Dengan kata lain polisi di Kabupaten Gunungkidul mempunyai beban pelayanan paling besar yaitu setiap seorang polisi melayani 671 penduduk, sedangkan beban pelayanan terkecil adalah polisi di Kota Yogyakarta di mana setiap 1 orang polisi melayani 218 penduduk saja.

http://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 3.1. Rasio Penduduk per Polisi di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

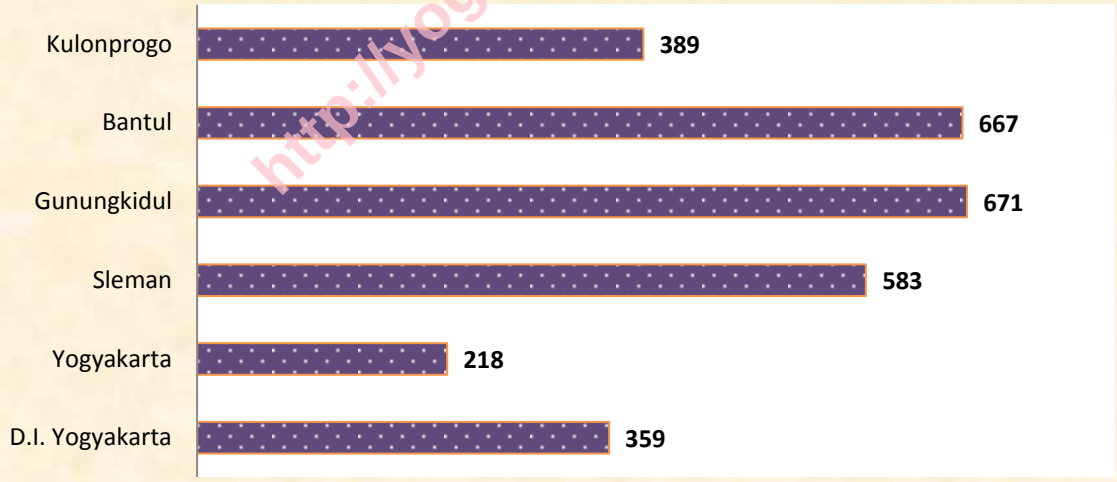

Sumber: Polres/Polresta/Polda di D.I. Yogyakarta

Polisi di D.I. Yogyakarta mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Perbandingan polisi perempuan dengan laki-laki mencapai 1:17. Ini disebabkan masih rendahnya minat perempuan untuk bekerja di pelayanan masyarakat bidang keamanan.

Pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa di D.I. Yogyakarta ada

26,71 persen desa/kelurahan mempunyai pos polisi, sedangkan 83,33 persen desa/kelurahan mempunyai poskamling.

Jumlah hansip yang ada di D.I. Yogyakarta mencapai 26.164 orang dengan rasio hansip per desa/kelurahan mencapai 1:60 artinya setiap 1 desa/kelurahan dilayani 60 hansip. Bila dilihat per kabupaten/kota, rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:31 artinya setiap 1 desa dilayani oleh 31 orang hansip, sedangkan rasio hansip terhadap desa/kelurahan paling besar berada di Kabupaten Bantul yaitu 1:86 artinya setiap desa dilayani oleh sekitar 86 orang hansip.

3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 5,44 persen. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sangat tajam sebesar 193,98 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tindak kejahatan, juga adanya perubahan bentuk pencatatan laporan tindak kejahatan yang lebih rinci. Bila dilihat menurut kabupaten/kota tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2014 terbanyak di Kabupaten Bantul yakni sebesar 2.570 kasus, disusul oleh Kabupaten Sleman (1.843 kasus) dan Kota Yogyakarta (1.778 kasus). Kondisi ini sedikit berbeda dangan tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2013 tercatat tiga kabupaten/kota dengan jumlah tindak kejahatan terbanyak masing-masing adalah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulonprogo.

http://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 3.2 Persentase Tindak Kejahatan yang dapat diselesaikan di D.I. Yogyakarta, 2013 - 2014

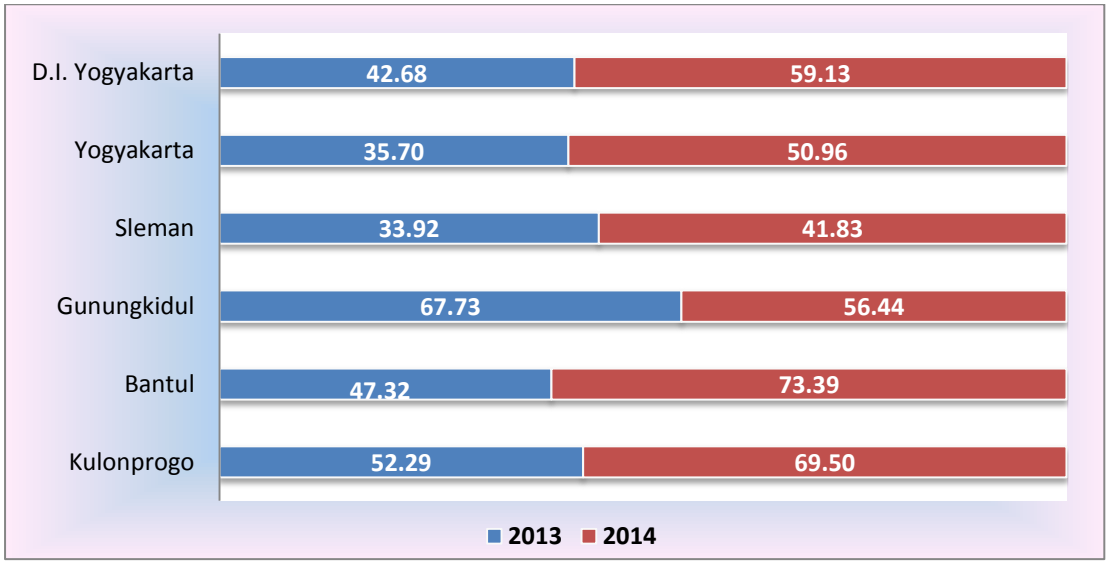

Sumber: Polres/Polresta/Polda di D.I. Yogyakarta

Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi pada tahun 2014 sebesar 59,13 persen dapat diselesaikan, mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2013 yang mencapai 42,68 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, persentase tindak kejahatan yang dapat diselesaikan di semua kabupatan/kota, kecuali Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang bervariatif.

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki masyarakat menggambarkan semakin tidak amannya suatu wilayah. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, resiko penduduk terkena tindak kejahatan tahun 2014 di semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, sebanding dengan meningkatnya jumlah tindak kejahatan di masing-masing kabupaten/kota se D.I. Yogyakarta.

3.3 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan

Menurut hasil Podes 2014, 64,61 persen desa/kelurahan di D.I. Yogyakarta terdapat kejadian tindak kejahatan pencurian, 21,92 persen ada kejadian tindak kejahatan penipuan/penggelapan dan 13,47 persen ada kejadian tindak kejahatan perjudian. Perhatian pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan, karena di D.I. Yogyakarta terdapat 8,45 persen desa/kelurahan ada kejadian tindak kejahatan "penyalahgunaan/pengedaran narkoba". Jika diamati berdasarkan jenis kejahatan, Kabupaten Sleman memiliki jumlah desa terbanyak dengan berbagai jenis tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lain.

http://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta 2014

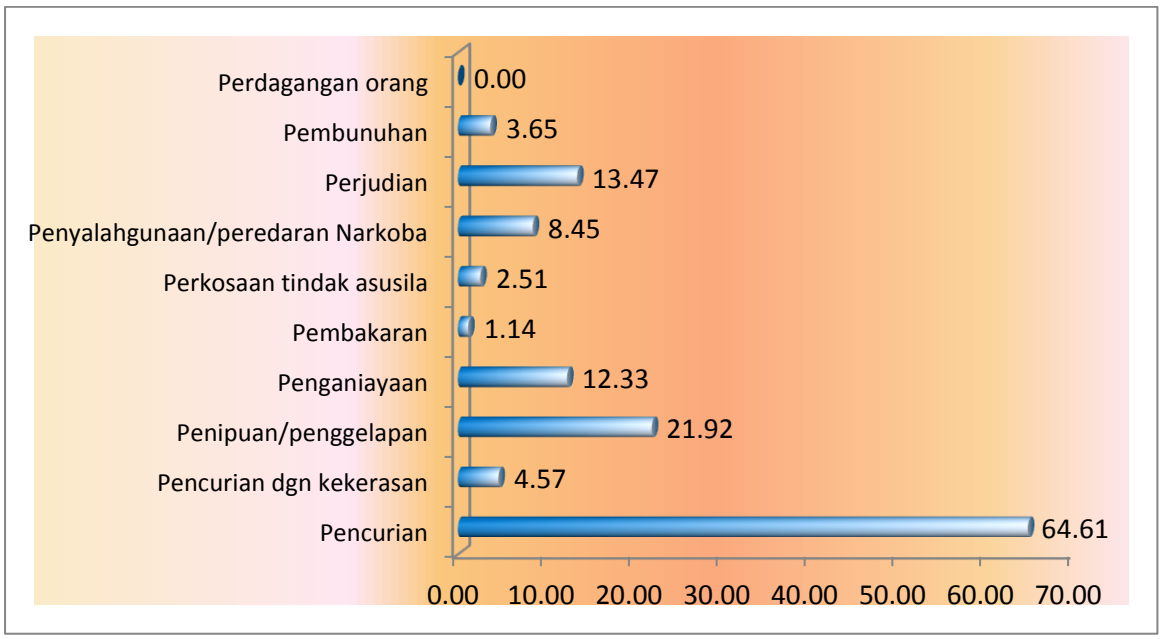

Sumber: Podes 2014

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2014 di D.I.Yogyakarta perkelahian massal terjadi di 12 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi pada jenis perkelahian antar kelompok warga. Kasus tersebut terjadi di 5 desa/kelurahan. Peringkat selanjutnya adalah perkelahian antar desa/kelurahan yang terjadi di 4 desa/kelurahan, dan perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa terjadi di 2 desa/kelurahan.

Bila dilihat menurut penggolongan kejahatan, pada tahun 2014 kasus kejahatan yang menonjol di D.I. Yogyakarta adalah kejahatan konvensional. Jumlah tindak kejahatan konvensional selama periode 2013 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 kejahatan konvensional mencapai 6.513 kasus, tahun 2014 meningkat menjadi 18.700 kasus. Golongan kejahatan terbanyak kedua adalah Kejahatan Kekayaan Negara, pada tahun 2014 mencapai 3.760 kasus.

Tabel 13 menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian tindak kejahatan pada tahun 2014 di D.I.Yogyakarta tercatat sebesar 11.047 kasus. Empat jenis kejahatan dengan persentase terbesar masing-masing adalah kasus gangguan (98,87%), kasus kejahatan kekayaan negara (89,28%), bencana (77,62%), dan kejahatan kontijensi (70,74%).

Bila dilihat menurut jam terjadinya tindak kejahatan, selang waktu terjadi tindak kejahatan terbanyak di kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta cukup bervariatif. Hal ini dapat dilihat di tabel 15. Sementara itu pada tahun 2014 selang waktu tindak kejahatan (*Crime clock*) di D.I. Yogyakarta adalah 28 menit 6 detik, artinya setiap 28 menit 6 detik di D.I. Yogyakarta terjadi 1 kasus tindak kejahatan. Kondisi ini lebih cepat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1 jam 21 menit, hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta semakin meningkat. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul mempunyai selang waktu tindak kejahatan paling lama yaitu lebih dari 28 jam, sedang Kabupaten Bantul paling cepat yaitu kurang dari 4 jam. Selang waktu tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul lebih cepat dibandingkan tahun 2013, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih lama.

Dari beberapa jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2014 di berbagai wilayah di D.I. Yogyakarta, salah satu jenis kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian kejahatan narkoba. Seperti yang disajikan pada tabel 16, kejadian kejahatan narkoba telah merambah di berbagai kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Tahun 2014, di D.I. Yogyakarta terdapat 140 kasus tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba. Jenis tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2014 terbanyak ditangani oleh Polda D.I. Yogyakarta sejumlah 104 kasus.

http://yogyakarta.bps.go.id

Pada tabel 17 tampak bahwa selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, terdapat 3 jenis kejahatan yang selalu menonjol di D.I. Yogyakarta yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan kekerasan. Persentase jumlah kejahatan tahun 2013 untuk ketiga jenis tindak kejahatan tersebut hampir 80 persen dari total kejahatan.

3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Selain informasi perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun secara berkesinambungan, penanganan kejahatan juga perlu memperhatikan secara serius tentang pelaku tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan pada tahun 2014 sebanyak 1. 915 orang. Tercatat 4,23 persen pelaku kejahatan dilakukan oleh anak-anak, 5 pelaku anak (0,26 %) di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 74,07 persen pelaku tindak kejahatan oleh anak-anak pada tahun 2014 berasal dari Kabupaten Sleman, sementara dari Kota Yogyakarta nihil.

Secara umum pelaku tindak kejahatan sebagian besar berasal dari Kabupaten Bantul (28,51%). Disusul secara berurutan pelaku dari Kabupaten Sleman (26,74%), Kota Yogyakarta (19,9%), Kabupaten Gunungkidul (7,31%) serta Kabupaten Kulonprogo (6,58 %).

http://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 3.4 Persentase Pelaku Tindak Kejahatan Oleh Anak-Anak dari Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta Tahun 2014

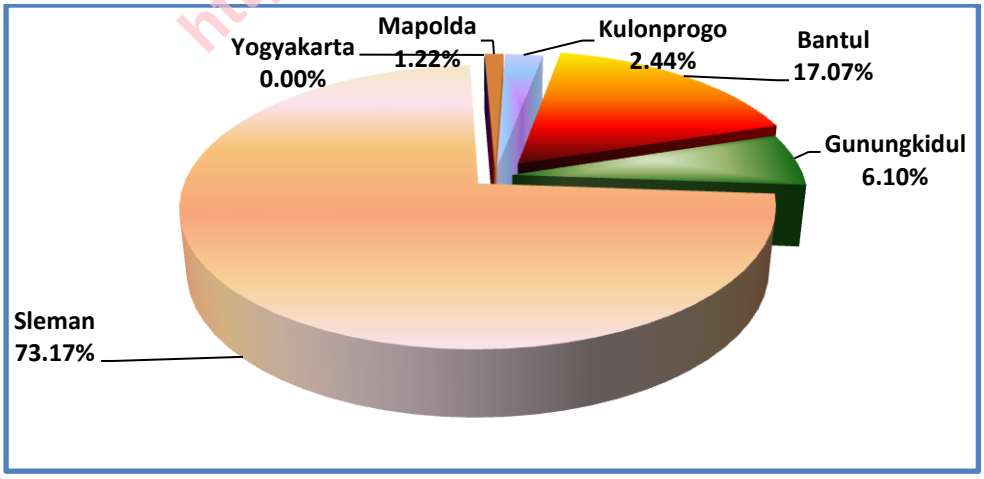

Sumber: Polres/Polresta/Polda di D.I. Yogyakarta

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menjaga keamanan, antara lain membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Menurut hasil Podes 2014, desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membangun poskamling 83,33 persen, membentuk regu

keamanan lingkungan 70,78 persen, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan 75,11 persen, menambah jumlah anggota hansip/linmas 44,52 persen, dan menggunakan cara-cara lainnya sebanyak 85,62 persen.

http://yogyakarta.bps.go.id

BAB IV. GAMBARAN UMUM POLITIK D.I. YOGYAKARTA

4.1 Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014

Perubahan sistem politik di Indonesia juga dirasakan di D.I. Yogyakarta. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat D.I. Yogyakarta. Kalau pada pemilu sebelum tahun 2009 ada 15 partai, pada pemilu 2014 hanya terdapat 10 partai yang mendapat kursi di DPR, walaupun perolehan suara sah di D.I. Yogyakarta masih didominasi oleh partai-partai lama. Hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Menurut data KPUD D.I. Yogyakarta jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 2.771.964 jiwa. Dari jumlah tersebut 80,04 persen menggunakan hak pilih dan 19,96 persen golput. Sedangkan perolehan suara dari jumlah tersebut 92,78 persen suara dinyatakan sah dan 7,22 persen suara tidak sah.

http://yogyakarta.bps.go.id

Gambar 4.1 Persentase Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta

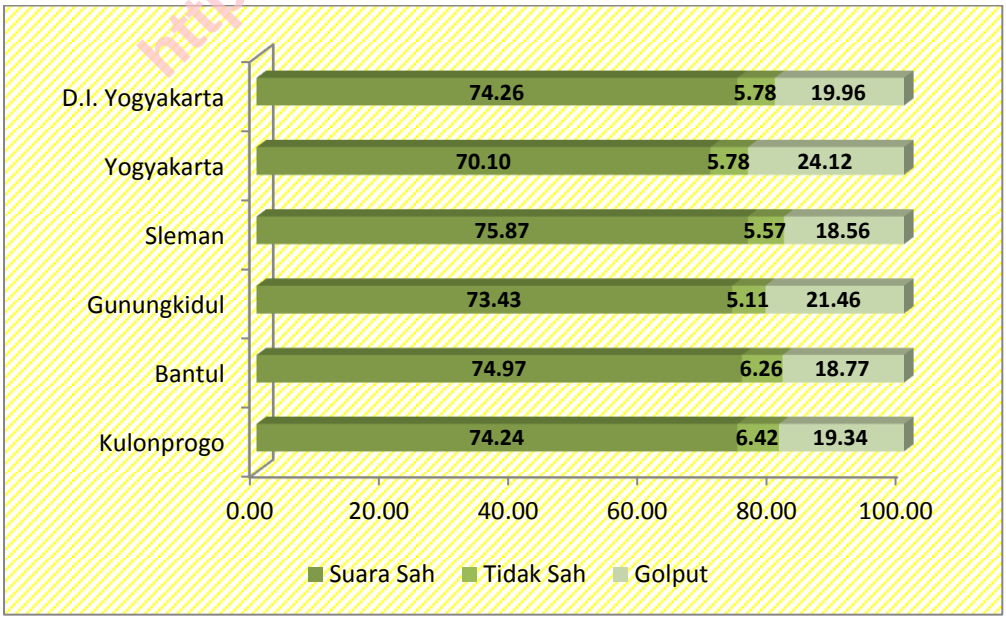

Sumber: KPU Kabupaten/kota/D.I. Yogyakarta

Menurut data KPUD D.I. Yogyakarta jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 sebanyak 2.812.144 jiwa. Dari jumlah tersebut 76,84 persen

menggunakan hak pilih dan 23,06 persen golput. Sedangkan perolehan suara dari jumlah tersebut 98,50 persen suara dinyatakan sah dan 1,50 persen suara tidak sah.

DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tabel 25 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik dan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2014. Dalam tabel tersebut tampak bahwa ada 10 partai yang mempunyai kursi di DPRD kabupaten/kota dan DPRD Tingkat I D.I. Yogyakarta. Masing-masing wilayah terdapat 10 partai yang mempunyai kursi di parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempunyai kursi yang terbanyak di semua kabupaten/kota. Tiga kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak masing-masing berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (50 orang), Kabupaten Gunungkidul (45 orang), dan Kabupaten Bantul (45 orang).

http://yogyakarta.bps.go.id

4.2 Peran DPRD

Salah satu peran DPRD dapat tercermin dari disetujuinya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk anggaran untuk sektor pendidikan maupun sektor kesehatan. Kedua sektor itu merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2014, di D.I. Yogyakarta alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mencapai sekitar 23,77 persen dari total anggaran. Alokasi ini sedikit meningkat dibanding alokasi anggaran sektor pendidikan pada tahun sebelumnya yang mencapai 23,04 persen. Jumlah anggaran pendidikan tahun 2014 juga sudah melebihi dari anggaran pendidikan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 20 persen. Ini merupakan wujud konsekuensi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pembangunan sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyadari pentingnya investasi jangka panjang sektor pendidikan bagi masyarakatnya.

Sektor kesehatan juga tak kalah penting dibanding sektor pendidikan. Pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di D.I. Yogyakarta mencapai sekitar 10,07 persen, meningkat 3,25 persen dibanding tahun 2013 dan juga sudah melebihi dari anggaran kesehatan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 10 persen.

Fungsi legislasi tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD kabupaten/kota maupun tingkat D.I. Yogyakarta. Perkembangan jumlah produk hukum selama 2 tahun terakhir memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, jumlah semua produk hukum yang dihasilkan DPRD menurun. Apabila di lihat menurut kabupaten/kota, penurunan jumlah produk hukum terjadi di semua kabupaten/kota. Sementara itu untuk Peraturan Daerah yang dihasilkan

hanya menurun di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul, sedang Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten/kota dan D.I. Yogyakarta 2014

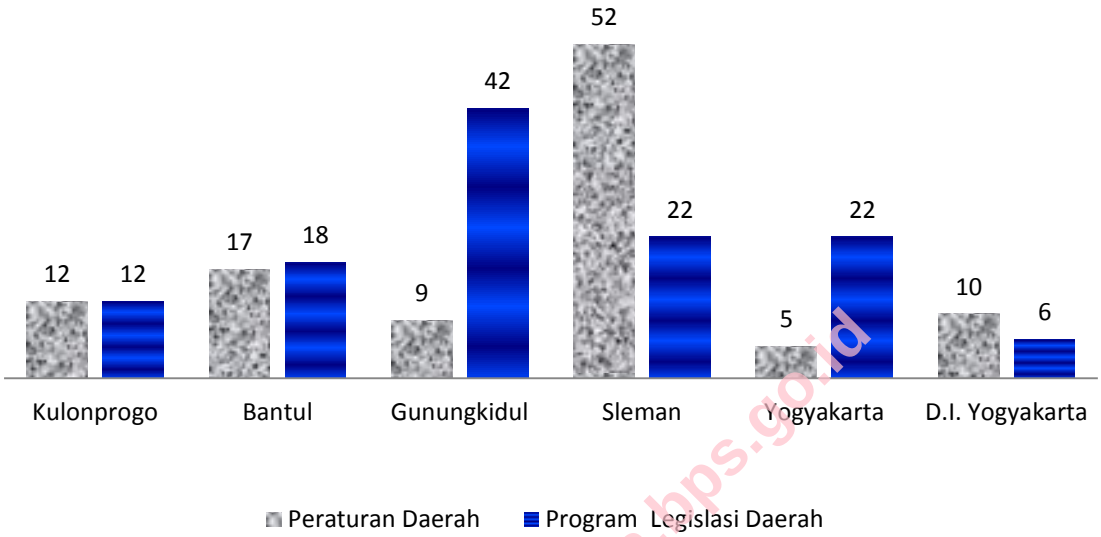

Sumber: KPU Kabupaten/kota/ D.I . Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

4.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undnag No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mah-kamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperolah suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Tabel 31 sampai dengan tabel 34 menyajikan data tentang pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih, jumlah pasangan calon, dan karakteristik pasangan terpilih pada pilkada tingkat kabupaten/kota terakhir di D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 23 Mei 2010, sedangkan di Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 19 Juni 2011 dan Kota Yogyakarta tanggal 25 September 2011. Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah untuk masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT terbesar, tampak bahwa lebih dari 70 persen masyarakat Bantul telah ikut serta dalam pemilukada di tahun 2010. Selain itu, perolehan suara untuk pasangan bupati terpilih di Kabupaten Bantul mencapai 67,67 persen. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di Kabupaten Bantul sudah cukup baik.

http://yogyakarta.bps.go.id

4.4. Perkembangan Demokrasi di D.I. Yogyakarta

Demokrasi merupakan sistem politik yeng memberikan bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

Freedom House melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak

tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya IDI Tahun 2009 diukur tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada tahun 2011 dan seterusnya. Metode pengumpulan data IDI menggunakan beberapa tahap seperti koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta 2014 sebesar 82,17 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 9,21 poin dibandingkan dengan IDI D.I. Yogyakarta 2013 yang sebesar 72,96. Dengan pencapaian nilai IDI tahun ini, tingkat kinerja demokrasi di DIY berubah dari kategori sedang menjadi kategori tinggi.

http://yogyakarta.bps.go.id

Perkembangan IDI D.I. Yogyakarta dari 2010 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2010 sebesar 67,55; 2011 sebesar 74,33; 2012 sebesar 71,67; 2013 sebesar 72,96; dan 2014 sebesar 82,17).

Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Demokrasi D.I. Yogyakarta, 2010-2014

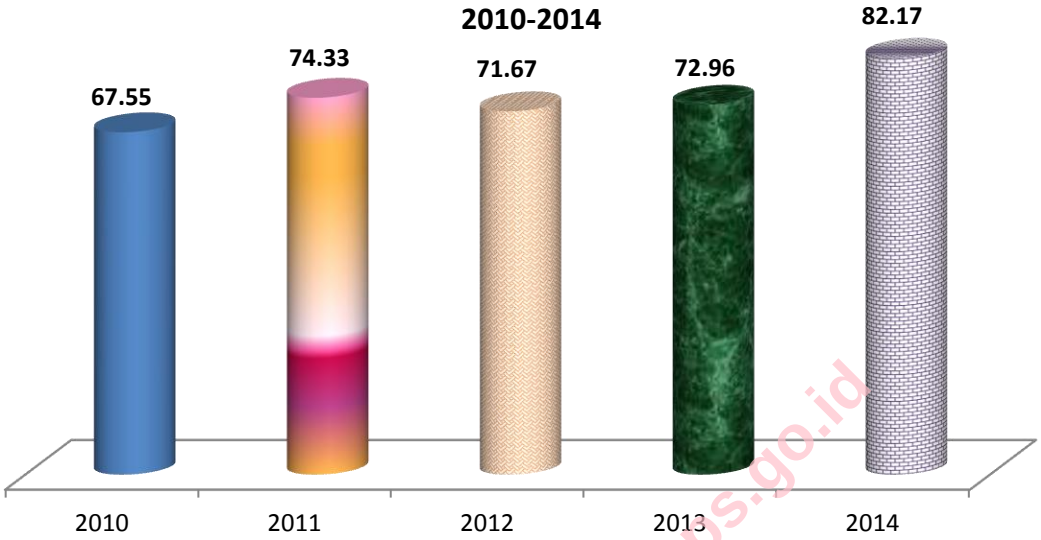

Sumber: BPS RI

http://yogyakarta.bps.go.id

Angka IDI 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 84,59; aspek hak-hak politik sebesar 76,06; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 88,82. Secara lebih rinci, pada 2014 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 25,41 dan 4,87 poin. Sementara nilai indeks hak-hak politik cenderung mengalami penurunan 6,19 poin.

Walaupun terjadi peningkatan indeks, pola sebaran nilai di atas masih sama dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil dan lembaga demokrasi secara umum terkategori "tinggi", sementara aspek hak-hak Politik masih "kurang memuaskan". Dari data IDI 2014 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berkurang cukup banyak.

Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Aspek Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta, 2010-2014

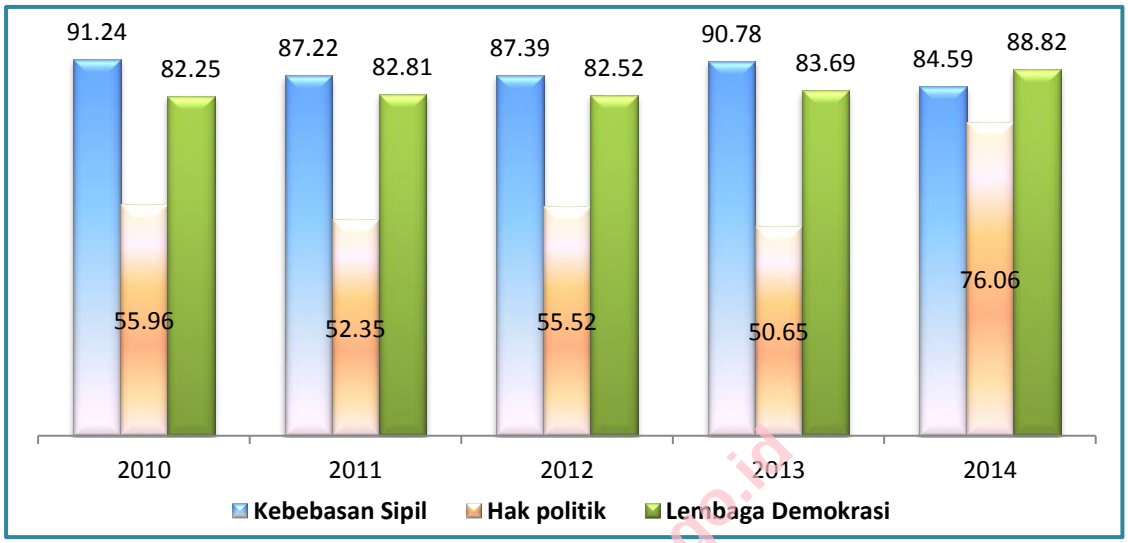

http://yogyakarta.bps.go.id

TABEL - TABEL

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*
01	Kulonprogo	586,28	12	88	405 222
02	Bantul	506,85	17	75	968 632
03	Gunungkidul	1 485,36	18	144	698 825
04	Sleman	574,82	17	86	1 163 970
71	Yogyakarta	32,50	14	45	400 467
34	**D.I. Yogyakarta**	**3 185,81**	**78**	**438**	**3 637 116**

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Polda	Polres/polresta	Polsek/polsekta
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Kulonprogo	-	1	12
02	Bantul	-	1	17
03	Gunungkidul	-	1	18
04	Sleman	1	1	19
05	Yogyakarta	-	1	14
	Jumlah	**1**	**5**	**80**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta

Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di D.I. Yogyakarta Tahun 2013

	Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Laki-laki	Jumlah Polisi Perempuan	Jumlah Polisi	Rasio Penduduk per Polisi
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
01	Kulonprogo	1 000	41	1 041	1 : 389
02	Bantul	1 384	68	1 452	1 : 667
03	Gunungkidul	1 001	41	1 042	1 : 671
04	Sleman	1 893	105	1 998	1 : 583
05	Yogyakarta	1 740	93	1 833	1 : 218
06	MAPOLDA DIY	2 560	216	2 776	-
	D.I. Yogyakarta	**9 578**	**564**	**10 142**	**1 : 359**

Sumber : Polres/PolrestaD.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

	Kabupaten/Kota	Pos Polisi	Pos Kamling
	(1)	*(2)*	*(3)*
01	Kulonprogo	16	63
02	Bantul	23	63
03	Gunungkidul	25	125
04	Sleman	29	83
71	Yogyakarta	24	31
34	**D.I.Yogyakarta**	**117**	**365**

Sumber : PODES 2014, BPS

Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan di D.I.Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Hansip	Rasio Hansip
(1)	*(2)*	*(3)*
01 Kulonprogo	5 856	67
02 Bantul	6 429	86
03 Gunungkidul	4 411	31
04 Sleman	6 579	77
05 Yogyakarta	2 889	64
D.I.Yogyakarta	**26 164**	**60**

Sumber : PODES 2014, BPS

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) di D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01 Kulonprogo	629	306	859
02 Bantul	580	617	2 570
03 Gunungkidul	402	344	303*)
04 Sleman	2 009	2 002	1 843*)
05 Yogyakarta	1 913	1 911	1 778
06 MAPOLDA DIY	1 194	1 181	11 347
D.I.Yogyakarta	**6 727**	**6 361**	**18 700**

Sumber : Polres/polresta/polda D.I.Yogyakarta
Keterangan : *) Angka sementara

Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) di D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2014

	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Kulonprogo	475	160	509
02	Bantul	314	292	540
03	Gunungkidul	231	233	171*)
04	Sleman	820	679	771*)
05	Yogyakarta	640	644	906
06	MAPOLDA DIY	857	664	538
	D.I.Yogyakarta	**3 337**	**2 672**	**3 435**

Sumber : Polres/polresta/polda D.I.Yogyakarta
Keterangan : *) Angka sementara

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) di D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2014

	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Kulonprogo	75,51	52,29	69,50
02	Bantul	54,14	47,32	73,39
03	Gunungkidul	57,46	67,73	56,44*)
04	Sleman	40,82	33,92	41,83*)
05	Yogyakarta	33,46	33,70	50,96
06	MAPOLDA DIY	71,78	56,22	59,28
	D.I.Yogyakarta	**46,26**	**42,68**	**59,13**

Sumber : Polres/polresta/polda D.I.Yogyakarta (Hasil Olahan)
Keterangan : *) Angka sementara

Tabel 9. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2014

	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Kulonprogo	161	74	212
02	Bantul	70	68	265
03	Gunungkidul	41	47	43*)
04	Sleman	56	56	158*)
05	Yogyakarta	86	96	444
	D.I.Yogyakarta	**184**	**187**	**514**

Sumber :Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta (Hasil Olahan)
Keterangan : *) Angka sementara

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 10. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal menurut Jenisnya per Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

Jenis Perkelahian		Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Antar kelompok warga	-	3	1	1	-	5
2.	Warga antar Desa/kelurahan	-	2	1	1	-	4
3.	Warga dengan aparat keamanan	-	-	-	-	-	-
4.	Warga dengan aparat pemerintah	-	-	-	-	-	-
5.	Antar Pelajar/ Mahasiswa	-	-	-	-	2	2
6.	Antar Suku	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	**-**	**6**	**2**	**2**	**2**	**12**

Sumber : BPS, Podes 2014

Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. Pencurian	63	39	67	72	42	283
2. Pencurian dengan Kekerasan	-	5	1	7	7	20
3. Penipuan/ Penggelapan	15	15	13	23	30	96
4. Penganiayaan	8	13	5	15	13	54
5. Pembakaran	1	-	1	2	1	5
6. PerkosaanTindak Asusila	1	3	2	4	1	11
7. Penyalahgunaan/Peredaran Narkoba	1	8	2	20	6	37
8. Perjudian	10	13	15	13	8	59
9. Pembunuhan	1	2	1	9	3	16
10. Perdagangan Orang	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, Podes 2014

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 12. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

No.	Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					MAPOLDA DIY	Total
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul *)	Sleman *)	Yogya karta		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Kejahatan Konvensional	771	2 147	293	1 841	1 536	6 590	13 178
2.	Kejahatan Trans Nasional	0	0	0	0	0	8	8
3.	Kejahatan Kekayaan Negara	0	1	2	0	0	3 757	3 760
4.	Kejahatan Kontijensi	1	158	8	0	102	1	270
5.	Pelanggaran Hukum	0	0	0	0	50	693	743
6.	Gangguan	69	100	0	2	90	270	531
7.	Bencana Alam/non Alam	18	164	0	0	0	28	210
	Jumlah	**859**	**2 570**	**303**	**1 843**	**1 778**	**11 347**	**18 700**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta (Hasil Olahan)
Keterangan : *) Angka sementara

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 13. Jumlah Penyelesaian Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta, Tahun 2014

No.	Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					MAPOLDA DIY	Total
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul *)	Sleman *)	Yogya karta		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Kejahatan Konvensional	509	1 537	150	769	757	2 690	6 412
2.	Kejahatan Trans Nasional	0	0	0	0	0	5	5
3.	Kejahatan Kekayaan Negara	0	1	0	0	0	3 356	3 357
4.	Kejahatan Kontijensi	1	134	2	0	53	1	191
5.	Pelanggaran Hukum	0	0	8	0	9	377	394
6.	Gangguan	69	97	0	2	87	270	525
7.	Bencana Alam/non Alam	18	117	0	0	0	28	163
	Jumlah	**597**	**1 886**	**160**	**771**	**906**	**6 727**	**11 047**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta (Hasil Olahan)
Keterangan : *) Angka sementara

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 14. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta, Tahun 2014

No.	Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					MAPOLDA DIY	Total
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul *)	Sleman *)	Yogya karta		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Kejahatan Konvensional	66,02	71,59	51,19	41,77	49,28	40,82	48,66
2.	Kejahatan Trans Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50
3.	Kejahatan Kekayaan Negara	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89,33	89,28
4.	Kejahatan Kontijensi	100,00	84,81	25,00	0,00	51,96	100,00	70,74
5.	Pelanggaran Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	54,40	53,03
6.	Gangguan	100,00	97,00	0,00	100,00	96,67	100,00	98,87
7.	Bencana Alam/non Alam	100,00	71,34	0,00	0,00	0,00	100,00	77,62
	Jumlah	**69,50**	**73,39**	**52,81**	**41,83**	**50,96**	**59,28**	**59,07**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D,I,Yogyakarta (Hasil Olahan)
Keterangan : *) Angka sementara

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 15. Selang Waktu (*Crime Clock*) Tindak Kejahatan menurut Golongan Kejahatan di D.I. Yogyakarta, Tahun 2014

	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
01	Kulonprogo	13.55'36"	29.00'00"	10.11'52"
02	Bantul	15.06'12"	14.11'51"	03.24'31"
03	Gunungkidul	21.47'24"	25.28'12"	28.54'39" *)
04	Sleman	04.30'00"	04.22'48"	04.45'11" *)
05	Yogyakarta	04.34'03"	04.48'04"	04.55'37"
06	MAPOLDA DIY	07.20'24"	07.25'12"	00.46'19"
	D.I.Yogyakarta	**01.22'12"**	**01.21'00"**	**00.28'06"**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I..Yogyakarta (Hasil Olahan)
Keterangan : *) Angka sementara

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 16. Jenis Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

	Kabupaten/Kota	Narkotika		Minuman keras	
		2013	2014	2013	2014
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
01	Kulonprogo	5	8	15	14
02	Bantul	21	21	34	88
03	Gunungkidul	3	7	5	0
04	Sleman	33	-	2	-
05	Yogyakarta	-	-	-	-
06	MAPOLDA DIY	117*)	104		8

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta
Keterangan : *) merupakan gabungan dari narkotika dan miras
- Data tidak tersedia

Tabel 17. Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di D.I. Yogyakarta Tahun 2012 - 2014

No,	Jenis Tindak Pidana	2012	2013	2014
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Pencurian dengan Pemberatan	945	885	628
2.	Pencurian Kendaraan Bermotor	535	745	529
3.	Pencurian dengan Kekerasan	220	161	185
4.	Penganiayaan Berat	40	53	65
5.	Kebakaran	92	60	44
6.	Pembunuhan	12	15	7
7.	Perkosaan	9	18	8
8.	Kenakalan Remaja	50	59	19
9.	Uang Palsu	4	2	1
10.	Narkotika	189	144	104
11.	Perjudian	116	111	66
12.	Pemerasan/Ancaman	30	40	26
	Jumlah	**2 242**	**2 293**	**1 682**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 18. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Dewasa			Anak-anak			Jumlah		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
01 Kulonprogo	123	1	124	2	0	2	125	1	126
02 Bantul	456	76	532	14	0	14	470	76	546
03 Gunungkidul	127	8	135	4	1	5	131	9	140
04 Sleman	416	36	452	55	5	60	471	41	512
71 Yogyakarta	352	29	381	0	0	0	352	29	381
06 MAPOLDA DIY	189	20	209	1	0	1	190	20	210
34 D.I.Yogyakarta	**1 663**	**170**	**1 833**	**76**	**5**	**81**	**1 739**	**176**	**1 915**

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 19. Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan menurut Jenisnya di D.I.Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Jenis Upaya menjaga Keamanan				
		1	2	3	4	5
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01	Kulonprogo	63	44	27	49	60
02	Bantul	63	48	38	69	66
03	Gunungkidul	125	101	36	102	127
04	Sleman	83	85	67	72	81
71	Yogyakarta	31	32	27	37	41
34	**D.I.Yogyakarta**	**365**	**310**	**195**	**329**	**375**

Keterangan :

1 : Membangun Pos Kamling

2 : Membentuk regu keamanan lingkungan

3 : Menambah jumlah anggota hansip/linmas

4 : Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan

5 : Lainnya

Sumber : BPS, Podes 2014

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 20. Jumlah Jaksa dan Non Jaksa menurut Jenis Kelamin di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Jaksa			Non Jaksa (Staf)		
		L	P	L+P	L	P	L+P
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
01	Kejaksaan Negeri Wates	8	10	18	28	17	45
02	Kejaksaan Negeri Bantul	8	12	20	44	17	61
03	Kejaksaan Negeri Wonosari	12	6	18	34	12	46
04	Kejaksaan Negeri Sleman	16	13	29	40	30	70
05	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	9	12	21	42	17	59
06	Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta	73	55	128	93	46	139
	Jumlah	**126**	**108**	**234**	**281**	**139**	**420**

Sumber : Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 21. Jumlah Hakim dan dan Non Hakim menurut Jenis Kelamin di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Hakim		Panitera		Juru Sita		PNS/Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
01	Pengadilan Negeri Wates	4	10	9	10	11	4	14	0
02	Pengadila Negeri Bantul	8	5	10	6	3	5	17	8
03	Pengadila Negeri Wonosari	6	6	8	7	13	3	17	5
04	Pengadila Negeri Sleman	7	4	9	15	4	0	24	12
05	Pengadila Negeri Yogyakarta	21	4	10	21	14	10	31	13
06	Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta	4	1	1	1	0	0	26	3
07	Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta	13	4	19	14	0	0	30	21
	Jumlah	**63**	**34**	**66**	**74**	**45**	**22**	**159**	**62**

Sumber : Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 22. Jumlah Perkara Penting Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta , Tahun 2014

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk Tahun Ini	Diselesaikan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*
1	Ketertiban Umum	0	13	8	5
2	Perkosaan	0	1	1	0
3	Perjudian	0	13	13	0
4	Kejahatan terhadap Nyawa	0	1	1	0
5	Penganiayaan Berat	0	1	1	0
6	Pencurian dengan Pemberatan	0	10	10	0
7	Pencurian dengan Kekerasan	0	13	13	0
8	Pemerasan dengan Ancaman	0	0	0	0
9	Penggelapan	2	60	48	14
10	Senjata Api	0	10	0	0
11	Narkotika	5	111	99	3
12	Psikotropika	0	1	1	0
13	Hak Kekayaan Intelektual	0	1	1	0
14	Perkara Kehutanan (Illegal Logging)	0	0	0	0
15	Perkara Lingkungan Hidup	0	0	0	0
16	Perbankan	0	1	1	0
17	Perkara Uang Palsu	0	0	0	0
18	Pertambangan Tanpa Ijin	0	0	0	0
19	Pencucian Uang	0	0	0	0
20	Perdagangan Orang, Perempuan, dan Anak (Trafficking)	0	3	3	0
21	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	1	1	0
22	Terorisme	0	0	0	0

Keterangan : - Perkara Penting sesuai Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-4/JA/3/1994
- Hanya Untuk Perkara Pidana

Sumber : Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 23. Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta, Tahun 2014

No.	Jenis Tindak Pidana	Sisa Tahun Lalu	PUTUSAN				
			Menguat kan Putusan P.N.	Menga-dili Sendiri	Pria	Wanita	Anak2 *)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Pemalsuan Uang	-	1	1	2	-	-
2.	Pemalsuan Surat	-	2	-	1	2	-
3.	Kejahatan Kesusialaan	1	8	6	12	1	-
4.	Kejahatan Perjudian	-	3	1	6	-	-
5.	Meninggalkan orang yang Perlu ditolong	-	-	-	-	-	-
6.	Penghinaan	1	1	-	-	1	-
7.	Penganiayaan	2	12	-	12	4	-
8.	Menyebabkan mati/ luka karena alpha	-	4	1	5	-	-
9.	Pencurian	-	15	2	18	-	2
10.	Pemerasan dan Pengancaman	-	-	-	-	-	-
11.	Pengelapan	-	10	5	13	2	-
12.	Penipuan	2	7	5	13	3	-
13.	Menghancurkan atau merusak barang	-	2	-	2	-	-
14.	Tindak Pidana Narkotika/ Psikotropika	-	22	9	30	2	-
15.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	-	2	-	2	-	-
16.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	3	-	3	-	-
17.	Perlindungan Anak	-	3	-	3	-	-
18.	Pencucian Uang	-	2	-	1	-	-
19.	Tindak Pidana Lain	-	7	5	22	-	-
	JUMLAH	**6**	**104**	**35**	**145**	**16**	**2**

Keterangan : *) yang dimaksud dengan "anak2" adalah yang berumur 21 tahun dan belum kawin, sehubungan dengan pegertian "remaja".

Sumber : Pengadilan Tinggi Provinsi D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 24. Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, Tahun 2014

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP / UU	Dewasa		Anak		Jumlah
			L	P	L	P	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Mata Uang	244-251	4	-	-	-	4
2.	Memalsukan Meterai / Surat	253-275	3	-	-	-	3
3.	Kesusilaan	281-297	15	1	1	-	17
4.	Perjudian	303	3	-	-	-	3
5.	Penculikan	324-336	1	-	-	-	1
6.	Pembunuhan	338-350	50	2	2	-	54
7.	Penganiayaan	351-356	43	1	1	-	45
8.	Pencurian	362-364	183	5	2	-	190
9.	Perampokan	365	7	-	-	-	7
10.	Pemerasan/Mengancam	368-369	17	-	-	-	17
11.	Penggelapan	372-375	51	2	-	-	53
12.	Penipuan	378	72	10	-	-	82
13.	Penadahan	480-481	6	1	-	-	7
14.	Narkotika	UU No. 35 Th. 2009	237	6	-	-	243
15.	Korupsi	UU No. 20 Th. 2001	39	3	-	-	42
16.	Pencucian Uang	UU No. 25 Th. 2003	2	2	-	-	4
17.	Laka Lantas	UU No. 22 Th. 2009	7	-	-	-	7
18.	Traficking	UU No. 21 Th. 2007	3	-	-	-	3
19.	Ilegal Loging	UU No. 41 Th. 1999	2	-	-	-	2
20.	Perlindungan Anak	UU No. 23 Th. 2002	99	-	3	-	102
21.	Keimigrasian	UU No. 9 Th. 1992	1	-	-	-	1
22.	KDRT	UU No. 23 Th. 2004	10	-	-	-	10
23.	Darurat	UU No 12 Th 1951	7	-	-	-	7
24.	Kesehatan	UU No 36 Th 2009	1	-	-	-	1
25.	Lain-lain		6	-	-	-	6
	Jumlah		**869**	**33**	**9**	**-**	**911**

Sumber : Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi D.I.Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 25. Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Tahun 2014

No,	Partai Politik	Kabupaten/Kota					
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	D.I.Yogya karta
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
01.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	2	2	5	1	3
02.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	3	3	5	-	5
03.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	5	5	6	4	6
04.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8	11	11	12	15	14
05.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5	6	6	4	5	8
06.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	6	6	7	5	7
07.	Partai Demokrat	2	4	4	1	1	2
08.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	7	7	6	5	8
09.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	-	4	4	2
10.	Partai Hati Nurani (Hanura)	1	1	1	-	-	-
	Jumlah	**40**	**45**	**45**	**50**	**40**	**55**

Keterangan : kol (1) adalah nomor urut dalam pemilu.
Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 26. Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Kelompok Umur								Jumlah		
		21-35		36-49		50-59		60+		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
01	Kulonprogo	2	2	20	4	10	1	1	0	33	7	40
02	Bantul	5	2	27	0	8	1	2	0	42	3	45
03	Gunungkidul	5	2	21	5	8	0	4	0	38	7	45
04	Sleman	5	4	25	7	6	1	1	1	37	13	50
05	Yogyakarta	3	2	16	7	8	1	3	0	30	10	40
	DPRD Provinsi	**0**	**1**	**29**	**2**	**17**	**2**	**3**	**1**	**49**	**6**	**55**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 27. Jumlah Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Kabupaten/Kota		Pendidikan Terakhir								Jumlah		
		≤ SLTA		D1 – D3		D4/S1		S2 – S3		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
01	Kulonprogo	14	1	0	0	17	6	2	0	33	7	40
02	Bantul	18	0	3	1	19	2	2	0	42	3	45
03	Gunungkidul	6	1	3	1	24	3	5	2	38	7	45
04	Sleman	12	2	0	1	23	8	2	2	37	13	50
05	Yogyakarta	8	1	2	0	19	6	1	3	30	10	40
	DPRD Provinsi	**4**	**1**	**0**	**0**	**37**	**4**	**8**	**1**	**49**	**6**	**55**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 28. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput di D.I. Yogyakarta

DPRD Prov

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara tidak Sah	Golput
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
01	Kulonprogo	337 038	250 213	21 647	65 178
02	Bantul	729 469	546 853	45 669	136 947
03	Gunungkidul	599 012	439 864	30 591	128 557
04	Sleman	794 582	602 824	44 291	147 467
71	Yogyakarta	311 863	218 623	18 028	75 212
34	**D.I.Yogyakarta**	**2 771 964**	**2 058 377**	**160 226**	**553 361**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 29. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Golput di D.I. Yogyakarta

DPRD Kab/Kota

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulonprogo	337 038	261 747	10 113	65 178
02	Bantul	729 675	560 727	31 574	137 374
03	Gunungkidul	599 071	453 161	17 262	128 648
04	Sleman	794 978	614 796	32 319	147 863
71	Yogyakarta	311 692	222 637	14 014	75 212
34	**D.I.Yogyakarta**	**2 772 625**	**2 113 068**	**105 282**	**554 275**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I. Yogyakarta

Tabel 30. Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 di D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		DPR RI		DPRD Prov.		DPRD Kab/Kota	
		L	P	L	P	L	P
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*		*(5)*
01	Kulonprogo			44	30	238	165
02	Bantul			84	56	263	203
03	Gunungkidul	56	40	63	44	258	189
04	Sleman			112	73	296	197
71	Yogyakarta			43	31	217	145
34	**D.I.Yogyakarta**	**56**	**40**	**346**	**234**	**1 272**	**899**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I.. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 31. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden 2014 dan Hasil Perolehan Suara Sah Suara Tidak Sah dan Golput di D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
			Suara Sah	Suara tidak Sah	Golput
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
01	Kulonprogo	335 897	264 026	4 127	69 888
02	Bantul	732 124	584 918	10 352	136 854
03	Gunungkidul	601 556	456 911	5 623	139 022
04	Sleman	818 960	659 395	9 883	149 682
71	Yogyakarta	321 425	246 341	3 588	71 494
34	**D.I.Yogyakarta**	**2 812 144**	**2 211 591**	**33 573**	**566 980**

Sumber : KPU Kabupaten/Kota/D.I.. Yogyakarta

Tabel 32. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan D.I. Yogyakarta Tahun 2013 dan 2014

Kabupaten/Kota	2013			2014	
	Peraturan Daeran	Keputusan DPRD	Keputusan Pimpinan DPRD	Peraturan Daerah	Program Legislasi Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
01 Kulonprogo	15	23	6	12	12
02 Bantul	17	50	28	17	18
03 Gunungkidul	17	39	16	9	42
04 Sleman	22	33	19	52	22
71 Yogyakarta	2	35	9	5	22
34 D.I. Yogyakarta	14	74	116	10	6

Sumber :Sekretariat DPRD se- D.I. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabal 33. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/walikota dan Wakil Bupati/walikota Terakhir di D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	19 Juni 2011	4
02	Bantul	23 Mei 2010	3
03	Gunungkidul	23 Mei 2010	4
04	Sleman	23 Mei 2010	7
71	Kota Yogyakarta	25 September 2011	3

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabal 34. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Terdaftar di DPT	Suara Sah	% Suara Sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	349 906	228 878	65 41
02	Bantul	691 982	487 877	70 50
03	Gunungkidul	582 914	407 571	69 92
04	Sleman	759 206	496 190	65 36
71	Kota Yogyakarta	322 872	200 726	62 17

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabal 35. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	105 965	46 30	PDI-P dan PAN
02	Bantul	330 615	67 67	Golkar PAN dan PKPB
03	Gunungkidul	146 849	36 03	PAN
04	Sleman	174 571	35 18	PDI-P PAN dan GERINDRA
71	Kota Yogyakarta	97047	48 35	PDI-P dan Golkar

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabal 36. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin Pendidikan Usia dan Jabatan Sebelumnya di D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01	Kulonprogo	Laki-laki	S-1/Spesialis II Kedokteran	46	Dokter Spesialis
02	Bantul	Perempuan	SMA	59	Ketua TP PKK
03	Gunungkidul	Laki-laki	S-3/Doktor	63	Dirjen di Depar-temen Kelautan dan Perikanan
04	Sleman	Laki-laki	S-2	49	Wakil Bupati
71	Kota Yogyakarta	Laki-laki	S-1	47	Wakil Walikota

Sumber : KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabal 37. Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 (dalam rupiah)

No	Tahun	Sektor Pendidikan		Sektor Kesehatan	
		Nominal	Persentase Thd Total Anggaran	Nominal	Persentase Thd Total Anggaran
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01	2012	618 881 769 883	-	183 177 606 180	-
02	2013	712 148 040 574	23 04	186 693 172 168	6 82
03	2014	872 166 891 980	23 77	369 481 135 361	10 07

Sumber : Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta

Tabel 38. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta 2010-2014

	Variabel/Aspek	2010	2011	2012	2013	2014
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Kebebasan Sipil	91 24	87 22	87 39	90 78	84 59
1.1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	98 75	98 75	90 00	98 75	46 25
1.2	Kebebasan Berpendapat	67 77	91 67	81 65	90 00	81 65
1.3	Kebebasan Berkeyakinan	96 80	91 55	93 34	94 00	95 13
1.4	Kebebasan dari Diskriminasi	84 15	70 85	74 15	80 40	73 45
2	Hak-Hak Politik	55 96	52 35	55 52	50 65	76 06
2.1	Hak Memilih dan Dipilih	52 25	52 25	52 25	52 83	77 59
2.2	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	59 68	52 46	58 78	48 48	74 53
3	Lembaga-lembaga Demokrasi	82 25	82 81	82 52	83 69	88 82
3.1	Pemilu yang Bebas dan Adil	91 66	91 66	91 66	91 66	97 47
3.2	Peran DPRD	32 31	42 17	37 60	38 26	50 96
3.3	Peran Partai Politik	97 89	96 64	99 72	99 23	100 00
3.4	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	87 98	87 98	87 98	87 98	100 00
3.5	Peran Peradilan yang Independen	100 00	95 00	95 00	100 00	95 00
	Indeks Demokrasi Indonesia	**67 55**	**74 33**	**71 67**	**72 96**	**82 17**

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta 2015

http://yogyakarta.bps.go.id

Tabel 39. Perkembangan Skor Indikator IDI Tahun 2013 dan 2014

Nomor	Indikator	2013	2014
	Kebebasan Sipil		
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100 00	40 00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90 00	90 00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	90 00	90 00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	90 00	40 00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	95 65	95 65
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah	90 00	100 00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	90 00	90 00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender etnis kelompok	50 00	50 00
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	100 00	100 00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100 00	100 00
	Hak-Hak Politik		
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	86 54	100 00
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak	50 00	60 00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30 00	79 64
14	Voters turnout	72 95	80 02
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	78 79	36 36
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	76 96	63 91
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	20 00	85 14
	Lembaga Demokrasi		
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90 91	100 00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	92 41	94 94
20	Alokasi anggaran pendidikan	40 38	41 16
	Alokasi anggaran kesehatan	63 48	47 81
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	21 43	20 00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3 57	100 00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100 00	100 00
24	% perempuan pengurus partai politik	92 28	100 00
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	98 68	100 00
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	77 27	100 00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100 00	90 00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100 00	100 00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta 2015

http://yogyakarta.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

http://yogyakarta.bps.go.id

ISSN 2460-3139

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan - Bantul
Telp. : (0274) 4342234 - Hunting, Fax. : (0274) 4342230
E-mail : bps3400@bps.go.id Homepage : http://yogyakarta.bps.go.id